



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MENUJU APBN TANPA COVID-19

**Ariesy Tri Mauleny**

Peneliti Muda

[ariesy.mauleny@dpr.go.id](mailto:ariesy.mauleny@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Setelah episode perjuangan melawan pandemi Covid-19 dan dilanjutkan dengan 'new normal' di sisa endemi yang ada, pemerintah mulai mengatur langkah strategis menuju normalisasi. Diawali dengan normalisasi fiskal pada tahun depan dengan memangkas alokasi belanja kesehatan yang semula Rp255,4 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp153,8-Rp209,9 triliun untuk APBN 2023, utamanya belanja penanganan pandemi Covid-19 yang mendekati Rp0. Selain itu, pemerintah juga tidak lagi meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah berjalan 3 tahun terakhir. Jadi RAPBN 2023 rencananya meniadakan bukan hanya belanja penanganan Covid-19, tetapi juga beragam insentif perpajakan, termasuk insentif kepabeanan untuk sektor yang berkaitan dengan Covid-19. Namun demikian, insentif kepabeanan akan lebih difokuskan pada mitigasi risiko dari berbagai dinamika global, terutama korelasi perang Rusia-Ukraina dengan krisis energi dan pangan. Termasuk, ancaman instabilitas moneter yang terjadi akibat resesi ekonomi di Amerika Serikat yang dikhawatirkan semakin membesar dan dapat berdampak pada ekonomi global.

Keberlanjutan insentif perpajakan dalam upaya pemulihan ekonomi juga mengalami penyesuaian dalam Pagu Indikatif RAPBN 2023 mengingat mayoritas dunia usaha dianggap telah cukup pulih. Normalisasi postur anggaran pada tahun depan juga tidak terlepas dari tuntutan UU No. 2 Tahun 2020 yang membatasi pelonggaran fiskal hanya sampai tahun 2022, dan kembali pada defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Dengan begitu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 menetapkan target defisit sebesar 2,61%-2,90% (Tabel 1).

**Tabel 1. Postur Anggaran (Rp triliun)**

KOMPONEN	APBN 2022	APBN-P 2022	RAPBN 2023
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.846,1</b>	<b>2.266,2</b>	<b>2.266,7 - 2.398,8</b>
I. Penerimaan Perpajakan	1.510,0	1.784,0	1.884,6 - 1.967,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6	481,6	380,1 - 427,3
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.714,2</b>	<b>3.106,4</b>	<b>2.795,9 - 2.993,4</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.944,5	2.301,6	1.995,7 - 2.161,1
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769,6	804,8	800,2 - 832,4
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(462,2)</b>	<b>(434,4)</b>	<b>(93,5) - (133,5)</b>
<b>D. Surplus (Defisit) Anggaran</b>	<b>(868)</b>	<b>(840,2)</b>	<b>(529,2) - (595,6)</b>
% Surplus (Defisit) Anggaran thd PDB	(4,85)	(4,5)	(2,61) - (2,90)
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>868,0</b>	<b>840,2</b>	<b>529,2 - 594,6</b>

Meski sebagian kalangan cukup optimis mengingat pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2022 cukup akseleratif yang tercermin dari realisasi penerimaan pajak mencapai Rp679,99 triliun (53,4% dari target APBN 2022). Namun demikian, APBN tanpa Covid-19, harus tetap diwaspadai karena sangat tergantung pada konsistensi kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, yang diharapkan tetap terjaga di atas 5,5% (Tabel 2). Optimalisasi penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja yang masih cukup besar, juga diharapkan tetap dapat menyokong konsolidasi fiskal. Apalagi Bank Indonesia (BI) sudah terlebih dahulu melakukan normalisasi moneter, sehingga tidak lagi menjalankan peran sebagai penopang pembiayaan APBN.

**Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

INDIKATOR	APBN 2022	APBN-P 2022	RAPBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	4,8 - 5,5	5,3 - 5,9
Inflasi (%)	3,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
Tingkat Bunga (%)	6,8	6,85 - 8,42	7,34 - 9,16
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.350,0	14.300 - 14.700	14.300 - 14.800
ICP (USD/Barel)	63,0	95 - 105	80 - 100
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	703,0	635 - 703	619 - 680
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.036,0	956 - 1.036	1.019 - 1.107

Oleh karena itu, alokasi belanja kesehatan sebaiknya tetap disusun lebih fleksibel sehingga tetap antisipatif. Bantalan sosial untuk memperkokoh daya beli masyarakat dari ancaman lonjakan inflasi, juga tetap dibutuhkan. Mengingat terdapat beberapa faktor hari ini yang berisiko mengerek inflasi lebih tinggi. Misalnya, kenaikan tarif dasar listrik kapasitas 3.000 VA ke atas dapat menekan daya beli masyarakat dan mengkontraksi indeks harga produsen. Kenaikan harga BBM pertamax dan dibatasinya pertalite juga akan mendorong peningkatan inflasi jika tidak dikompensasi, disamping terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas nilai tukar. Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut tetap perlunya perluasan perlindungan di tahun berjalan 2022 (Rp triliun) meliputi bantuan PKL, warung dan nelayan (1,7), BLT minyak goreng (7,5), Bantuan Pendidikan (9), Kartu Pekerja (11), BLT desa (28,8), Kartu Sembako (45,1) dan PBI JKN (46,5).

Tantangan lain di tahun 2023 disampaikan Menteri Keuangan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR bahwa pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor sebagai motor penerimaan negara seperti 2021-2022 dimana ekspor mengalami commodity boom. Tahun depan, ekspor akan menuju normalisasi dan tidak lagi menjadi motor pertumbuhan seiring perlambatan ekonomi dunia. Di sisi lain, implementasi UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga akan mulai dilaksanakan pada semester II-2022.

## Atensi DPR

Normalisasi menuju APBN 2023 tanpa Covid-19 harus menjadi perhatian semua pihak. DPR RI khususnya Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah agar dapat memitigasi dan menganalisis dengan cermat dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan jika normalisasi menuju APBN 2023 tanpa Covid-19 dijalankan di tengah kondisi dan tantangan hari ini. Selain itu Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah agar menyiapkan strategi-strategi ke depan untuk meminimalisir dampak tersebut.

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, Komisi XI memberikan atensi untuk memastikan pemerintah ketika menerapkan kebijakan penghapusan insentif yang diterima selama pandemi (PPH Pasal 21, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan Bea Masuk, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Percepatan Restitusi PPN, PPN sewa unit, PPnBM DTP untuk mobil dan rumah) harus memerhatikan kompensasi yang perlu dilakukan sehingga dapat tetap mendorong peredaran uang dan meningkatkan konsumsi masyarakat serta memproteksi perekonomian Indonesia agar tetap tumbuh.

### Sumber

*Bisnis Indonesia*, 3,4,7, dan 9 Juni 2022;

*Kompas*, 4 Juni 2022;

*Kontan*, 5 Juni 2022;

*Media Indonesia*, 4 Juni 2022;

*Republika*, 6 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

### EDITOR

#### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

#### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rasbin  
Eka Budiyanti  
Nidya Waras Sayekti  
Dewi Wuryandani

#### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022